

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Komparatif Gabriel A. Almond

Studi komparatif dalam ilmu politik merupakan metode yang digunakan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara sistem politik di berbagai negara. Salah satu pendekatan yang paling terkenal dalam studi komparatif adalah model yang dikembangkan oleh Gabriel A. Almond yang dikenal sebagai model struktural-fungsional. Model ini menekankan bahwa semua sistem politik, baik modern maupun tradisional, dapat dianalisis berdasarkan struktur yang dimilikinya dan fungsi yang dijalankan oleh struktur tersebut. Dengan demikian, model ini menyediakan kerangka kerja sistematis untuk membandingkan berbagai sistem politik di seluruh dunia secara ilmiah dan terukur.

Dalam pembahasan "*A Comparative Political System Approach*" Gabriel A. Almond, dijelaskan bahwa sebelum munculnya pendekatan Almond, kajian politik cenderung bersifat legalistik dan institusional, dengan fokus utama pada analisis konstitusi, lembaga resmi seperti parlemen dan pengadilan, serta norma - norma hukum formal. Akan tetapi, Almond menganggap pendekatan ini tidak cukup untuk menjelaskan realitas politik yang kompleks, terutama di negara-negara non-Barat yang memiliki struktur politik yang berbeda dengan tradisi Barat. Oleh karena itu, ia mengadopsi gagasan dari teori sistem dalam ilmu sosial lain, seperti sosiologi dan antropologi, dan mengembangkan kerangka kerja yang lebih

input, struktur internal, output, dan interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Menurut Almond, sistem politik tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan internasional. Pada bagian atas diagram, dapat dilihat bahwa lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi nasional, serta lingkungan internasional, berperan sebagai faktor yang memengaruhi dan memberi tekanan pada sistem politik. Lingkungan ini dapat berupa kondisi ekonomi suatu negara, nilai-nilai sosial budaya, dinamika demografi, atau tekanan dari negara lain. Faktor-faktor tersebut akan mendorong munculnya tuntutan, kebutuhan, atau aspirasi dalam masyarakat. Semua tekanan dan pengaruh dari lingkungan eksternal tersebut masuk ke dalam sistem sebagai input.

Input yang disebutkan dalam model Almond meliputi artikulasi dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan mengacu pada cara individu atau kelompok dalam masyarakat menyampaikan aspirasi, keinginan, tuntutan, dan keluhan mereka kepada negara. Hal ini dapat dilakukan melalui demonstrasi, posting media sosial, surat kepada editor, opini publik, atau aksi protes. Sementara itu, agregasi kepentingan adalah proses di mana semua aspirasi yang masih terfragmentasi dirangkum dan dirumuskan menjadi agenda atau program politik yang lebih terorganisir. Proses ini biasanya dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan, atau organisasi masyarakat sipil. Di sisi kanan gambar, dapat dilihat bahwa input ini mengalir melalui struktur seperti partai politik dan kelompok

kepentingan menuju inti sistem politik.

Adapun tiga fungsi utama sistem politik yakni sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses penyampaian nilai-nilai dan pengetahuan politik kepada warga negara melalui pendidikan, media sosial, atau pengalaman sosial. Rekrutmen politik merupakan mekanisme pemilihan aktor politik yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan penting pemerintahan, seperti pemilihan umum atau pemilihan partai. Sementara itu, komunikasi politik menggambarkan aliran informasi yang timbal balik antara masyarakat dengan elite politik, baik melalui media konvensional maupun digital. Ketiga fungsi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses politik dan bahwa aktor politik yang terpilih memahami dan mewakili aspirasi publik.

Dalam pendekatannya, Almond juga mendefinisikan sistem politik sebagai serangkaian interaksi dalam masyarakat yang terkait dengan pengambilan keputusan kolektif dan implementasi kebijakan yang mengikat semua anggota masyarakat. Ia memperkenalkan konsep input dan output sebagai mekanisme dasar dalam sistem politik. Input terdiri dari tuntutan sosial, seperti kebutuhan akan keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan bentuk dukungan terhadap legitimasi sistem. Informasi ini kemudian diolah oleh lembaga politik, menghasilkan output dalam bentuk kebijakan dan keputusan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Almond juga mengidentifikasi fungsi universal yang harus dilakukan semua sistem

politik, terlepas dari bentuk struktur politiknya (Almond, 1956). Fungsi input meliputi artikulasi kepentingan (transmisi aspirasi individu atau kelompok), agregasi kepentingan (kombinasi dan formulasi tuntutan dengan cara yang lebih terorganisir), rekrutmen politik (proses pemilihan dan pengangkatan individu ke jabatan politik), dan sosialisasi politik (proses pembentukan orientasi politik individu melalui pendidikan, media, dan pengalaman sosial. Sementara itu, fungsi output meliputi pembuatan aturan (*lawmaking*), penerapan aturan (*law enforcement*), dan adjudikasi aturan (penyelesaian sengketa hukum).

Salah satu kontribusi penting Almond adalah menggeser fokus kajian politik dari bentuk lembaga ke fungsi yang dijalankannya. Menurut Almond, tidak semua negara perlu memiliki lembaga yang sama (seperti parlemen atau partai politik formal), tetapi setiap sistem politik harus mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar tersebut. Artinya, struktur politik di negara berkembang atau negara tradisional yang mungkin berbeda dari model Barat tetap dapat dianalisis dengan perangkat analisis yang sama, selama fungsi inti mereka terpenuhi. Dengan demikian, pendekatan Almond memungkinkan perbandingan yang lebih inklusif dan valid antara negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Dalam pendekatan komparatif ini, Almond juga menekankan pentingnya membuat generalisasi yang dapat diterapkan di berbagai budaya. Menurutnya, studi politik tidak boleh dibatasi pada pengalaman Barat saja, tetapi harus mampu menangkap dinamika politik dalam berbagai

konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengadvokasi penggunaan konsep analitis umum seperti fungsi sistem, input-output, dan struktur fungsional untuk membangun teori politik komparatif global. Fitur utama pendekatan Almond adalah universalitas (setiap masyarakat memiliki sistem politik, meskipun dalam bentuk yang berbeda), analisis mekanisme input dan output untuk menilai efektivitas sistem politik, fokus pada fungsi daripada struktur formal, dan penekanan pada kapasitas adaptif sistem politik terhadap perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal (Almond, 1956).

Model ini sangat berguna untuk membandingkan bagaimana dua sistem politik yang berbeda menanggapi dinamika sosial yang serupa. Misalnya, dalam studi tentang fenomena *Cancel culture* di Indonesia dan Korea Selatan, model Gabriel A. Almond dapat membantu menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi di kedua negara tersebut berbeda dalam menanggapi tuntutan sosial atas akuntabilitas moral tokoh publik. Di Korea Selatan, struktur politik dan budaya sosial yang kuat memungkinkan fungsi input seperti artikulasi dan agregasi kepentingan dilakukan dengan cepat dan efektif, dengan dukungan media dan kesadaran publik yang tinggi. Hal ini berdampak pada fungsi output yang lebih tegas dalam bentuk sanksi sosial dan hukum terhadap tokoh publik yang bermasalah.

Sebaliknya, di Indonesia, struktur sosial dan politik yang lebih permisif dan penegakan hukum yang lemah menghambat efektivitas fungsi politik tersebut. Meskipun aspirasi publik sering disampaikan melalui

media sosial, kurangnya kepentingan organisasi dan lemahnya respons dari lembaga negara telah mengakibatkan banyak kasus *Cancel culture* yang tidak memiliki dampak hukum atau sosial yang signifikan terhadap para pelakunya. Fungsi input di Indonesia sangat aktif melalui media sosial, tetapi tidak diikuti oleh fungsi output yang kuat, sehingga proses akuntabilitas menjadi kurang optimal (Altamira & Movementi, 2023).

Selanjutnya, Gabriel A. Almond juga menekankan pentingnya budaya politik sebagai latar belakang berfungsinya sistem politik. Budaya politik mencerminkan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana orang berpartisipasi dalam proses politik. Budaya politik partisipatif di Korea Selatan, misalnya, mendorong warga negara untuk terlibat dalam memantau tokoh masyarakat dan menuntut perubahan. Sementara itu, budaya politik patrimonial dan toleran di Indonesia cenderung menempatkan masyarakat dalam posisi pasif dan permisif terhadap pelanggaran moral oleh elit politik.

Dengan menggunakan model Gabriel A. Almond secara komprehensif, para peneliti dapat memperhitungkan perbedaan dalam perilaku politik masyarakat, efektivitas lembaga, dan kemampuan sistem politik untuk menanggapi tuntutan sosial. Model ini tidak hanya memungkinkan perbandingan yang adil antara kedua negara, tetapi juga membantu memetakan kelemahan dan kekuatan masing-masing sistem politik dalam menanggapi fenomena sosial yang kompleks seperti *Cancel*

culture.

Pendekatan sistem politik yang diperkenalkan oleh Gabriel A. Almond merupakan tonggak penting dalam pengembangan ilmu politik komparatif. Dengan kerangka input-output dan analisis fungsi sistem, Almond telah berhasil menciptakan alat konseptual yang memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap berbagai sistem politik di seluruh dunia. Pendekatannya tidak hanya memperkaya wawasan tentang variasi dalam sistem politik global, tetapi juga mendorong pengembangan teori-teori baru yang lebih relevan dalam menghadapi kompleksitas politik dunia modern.

2.2 Konsep Cancel culture

Cancel culture merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di era digital, di mana individu atau kelompok berusaha untuk menghentikan dukungan terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan atau pelanggaran moral. Budaya ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, karena biasanya *Cancel culture* dilakukan mulai dari media sosial. Media sosial telah menjadi wadah bebas di mana setiap orang bisa menyampaikan kritik dan mengutarakan pendapatnya. Menurut Meriam-Webster, *Cancel culture* merupakan kecenderungan untuk “membatalkan” seseorang atau kelompok sebagai cara mengekspresikan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial (Morgan, 2021). Sementara itu, *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *Cancel Culture* sebagai sikap atau aksi kelompok yang menolak dukungan terhadap seseorang akibat tindakan atau perkataan yang dianggap

menyinggung (Semenova, 2023).

Menurut Lisa Nakamura seorang profesor di bidang studi media *Michigan University* yang berasal dari Amerika Serikat menyatakan bahwa *Cancel culture* adalah "sebuah bentuk aksi kolektif di dunia digital, di mana masyarakat menggunakan kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban individu atau kelompok yang melanggar norma sosial atau nilai-nilai moral." Nakamura juga menyoroti bahwa *Cancel culture* sering menjadi alat pemberdayaan bagi mereka yang merasa terpinggirkan untuk melawan ketidakadilan (Nakamura, 1995).

Meredith Clark, seorang jurnalis media sekaligus anggota dari *Associate Professor at Northeastern University* yang berasal dari Amerika Serikat, mendefinisikan *Cancel culture* sebagai "mekanisme masyarakat untuk memutuskan hubungan atau memberikan sanksi sosial kepada seseorang atau institusi atas tindakan atau ucapan yang dianggap melanggar norma." Ia menambahkan bahwa *Cancel culture* adalah cara masyarakat untuk mengalihkan perhatian publik dari tokoh yang dianggap problematik ke arah diskusi yang lebih berorientasi pada keadilan sosial (D. Clark, 2020)

Konsep dasar dari *Cancel culture* merupakan respons kolektif terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap melanggar norma sosial. Ini sering kali dilakukan melalui media sosial, di mana individu dapat dengan cepat menyebarkan kritik dan memobilisasi dukungan untuk memboikot orang atau kelompok tertentu. *Cancel culture* memiliki dampak signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dampak terhadap individu bisa sangat merugikan, mereka dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, bahkan dukungan sosial (Aja Romano, 2019).

Cancel culture bisa ditelusuri dari berbagai bentuk sanksi sosial yang sudah ada sebelumnya. Salah satu contohnya muncul di Tiongkok tahun 1991 dengan istilah *renrou sousuo*, yang secara harfiah berarti 'pencarian daging manusia'. Istilah ini merujuk pada usaha bersama pengguna internet untuk membongkar identitas individu yang diduga melakukan tindakan tidak bermoral contohnya korupsi. Caranya dilakukan melalui pengumpulan informasi baik secara online maupun offline, hingga akhirnya orang tersebut diserang secara publik dan diasingkan.

Tekanan psikologis juga menjadi masalah serius bagi mereka yang menjadi target *Cancel culture*. Dari sisi masyarakat, fenomena ini dapat memperdalam polarisasi sosial dan membatasi kebebasan berekspresi karena orang-orang mungkin enggan mengungkapkan pandangan berbeda karena takut akan adanya pembalasan dari orang-orang di sosial media. Oleh karenanya, *Cancel culture* mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat modern dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatur perilaku individu dalam norma sosial yang terus berubah.

Selain itu, *Cancel culture* sendiri sudah lama dikenal atau dipraktikkan oleh negara lain sebagai reaksi terhadap fenomena yang melibatkan masyarakat di media sosial, namun masyarakat Indonesia masih belum banyak mengetahui budaya tersebut. Selebriti, musisi, influencer,

dan politisi terkenal lebih rentan untuk diberi sanksi “*Cancel*” ketika mereka dinyatakan bersalah atas kesalahan yang dianggap pantas oleh masyarakat untuk dihukum.

Korea Selatan adalah negara lain di Asia yang telah mengenal *Cancel culture* dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Korea Selatan telah berhasil menguasai industri hiburan di banyak negara di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menghasilkan tokoh publik, politisi, artis dan influencer yang sangat terkenal di negaranya dan di seluruh dunia. Tokoh publik ini harus siap untuk mendapatkan banyak perhatian publik selama karir mereka karena masyarakat, terutama masyarakat Korea Selatan yang menganggap mereka sebagai panutan yang dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Jika skandal atau berita yang dianggap melanggar etika atau moral melibatkan tokoh publik, politisi, artis atau influencer di Korea Selatan, publik dapat menghentikan mereka. Ini karena masyarakat Korea Selatan sangat menghormati nilai-nilai moral. Kontrol sosial masyarakat terdiri dari berbagai peraturan yang disepakati oleh masyarakat untuk menjaga nilai-nilai standar. Peraturan ini dibuat untuk menghindari penyimpangan moral dan untuk menghentikan tindakan *Cancel* ketika terjadi penghakiman, pengasingan, dan pengusiran dari lingkungan sosial.

Mengakhiri karir seseorang di ranah publik melalui *Cancel culture* merupakan tindakan yang tidak mudah. Meskipun beberapa dari mereka mengalami penilaian negatif dan kritik yang tajam, tidak banyak yang

benar-benar mengalami karir nya berakhir akibat gerakan tersebut. Ketika seorang politisi, selebriti ataupun publik figur lainnya melakukan atau mengungkapkan hal yang kontroversial dan bisa membuat skandal, akan terjadi gerakan penolakan terhadap mereka. Fenomena ini sering kali berdampak pada akhir karir mereka atau merusak reputasi mereka, baik melalui boikot atau tindakan disiplin lainnya.

Untuk mengakhiri proses karir seseorang dengan *Cancel culture*, sistem tersebut merupakan hal yang cukup sulit. Berbagai macam opini dari kebanyakan orang hanya mengalami berbagai kritik atau ujaran kebencian saja, setelah itu semuanya redam dengan munculnya masalah – masalah baru.

Dalam polanya *Cancel culture* yang dilakukan oleh platform digital ataupun media sosial ini sangat menunjukkan bahwa betapa cepat dan mudahnya netizen dibalik media sosial bereaksi dan menanggapi isu – isu dari sebuah konten. Walaupun di Indonesia hal ini masih sangat masif, namun Masyarakat Indonesia hampir 95% menggunakan media sosial. Oleh karena itu, penyebaran berita akan sangat cepat dan Masyarakat akan dengan berbondong – bondong memberikan berbagai respon melalui media sosial entah itu respon negatif ataupun respon positif (Yanuar et al., 2023).

Meskipun tujuan utama dari *Cancel culture* adalah untuk memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang melanggar norma, namun fenomena ini juga penuh dengan kontroversi. Meskipun ada yang berpendapat bahwa *Cancel culture* bisa menjadi metode efektif untuk

meminta pertanggungjawaban seseorang, akan tetapi fenomena ini bisa menjadi strategi untuk menghukum seseorang dengan cara yang tidak adil bila seseorang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

Korban dari *Cancel culture* mengalami dampak yang signifikan. Mereka yang mengalami penolakan yang mungkin merasa tidak berharga, kehilangan popularitas, kehilangan kesempatan kerja, dan penolakan dari masyarakat umum. Keadaan ini bahkan dapat menimbulkan rasa kesepian, kecemasan, depresi bahkan peluang bunuh diri yang lebih besar bagi yang mengalaminya.

Fenomena sosial yang kompleks dan beragam yang dikenal sebagai *Cancel culture* ini melibatkan intervensi massal terhadap orang atau entitas yang dianggap melanggar norma sosial. Meskipun memiliki tujuan positif untuk membuat masyarakat bertanggung jawab dan mendukung nilai-nilai sosial, *Cancel culture* juga memiliki risiko yang serius, seperti gangguan mental dan kemungkinan hal-hal ekstrem. Agar dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis, penting untuk memahami kedua aspek dari fenomena ini.

2.3 Budaya, Media Sosial dan Politik

Di lingkungan masyarakat kontemporer, politik, media sosial, dan budaya merupakan tiga komponen yang saling terkait dan berdampak satu sama lain. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi politik kepada masyarakat. Dalam hal ini, media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan politisi.

Pesan-pesan politik dapat disebarluaskan melalui media sosial, memengaruhi opini publik dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik terkini.

Dalam lingkungan kebudayaan, media sosial berfungsi sebagai alat sosialisasi yang mengenalkan masyarakat pada berbagai aspek budaya baik lokal maupun global. Dengan demikian, media sosial tidak hanya memberi informasi tetapi juga membentuk identitas budaya masyarakat. Di sisi lain, media sosial juga dapat menciptakan homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat yang sama menjadi homogen (Tanudjaja, 2009).

Media sosial juga berfungsi sebagai “anjing penjaga” (*watch dog*) yang memantau kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Dalam konteks ini, media diharapkan dapat memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat marginal. Namun, untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, independensi media sangatlah penting. Ketika media terlibat dalam kepentingan politik atau ekonomi tertentu, kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuasaan menjadi lemah.

Secara keseluruhan, hubungan antara politik, media sosial, dan budaya bersifat kompleks dan dinamis. Budaya membentuk cara masyarakat memahami dan menerima informasi, dan media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menciptakan wacana politik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap ketiga komponen

tersebut sangat penting untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer.

2.4 Peran Kebudayaan Dalam Politik di Indonesia dan Korea Selatan

Kebudayaan memegang peranan penting dalam politik, baik di negara Indonesia maupun Korea Selatan, karena budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial dan cerminan nilai-nilai kolektif, namun juga sebagai arena perdebatan isu-isu sosial, politik, dan moral. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena “*Cancel culture*” menjadi topik hangat di kedua negara tersebut, karena memengaruhi cara masyarakat merespons perilaku publik, selebriti, dan bahkan institusi politik. Meski memiliki akar yang sama dalam budaya populer global, namun manifestasi dan dampak *Cancel culture* di Indonesia dan Korea Selatan memiliki nuansa dan dinamika yang berbeda, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara.

Cancel culture di Indonesia muncul sebagai respon atas ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku atau pandangan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai moral yang berlaku. Di mana masyarakat sangat mementingkan nilai-nilai kolektif seperti menghargai orang lain, etika dan moralitas berbasis agama, perilaku yang dianggap melanggar atau merugikan nilai-nilai tersebut seringkali mendapat reaksi keras. Seiring dengan berkembangnya jejaring sosial, opini dapat dengan mudah disebarluaskan dan diakses oleh banyak orang, respon terhadap pelanggaran sosial semakin cepat dan masif. Selebriti, publik figur,

bahkan perusahaan besar pun bisa menjadi sasaran kritik yang berujung pada boikot atau tekanan untuk meminta maaf jika dianggap melakukan kesalahan. Fenomena ini semakin terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan seperti “Tuduhan *Hashtag*”, di mana individu atau kelompok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial.

Di Indonesia, *Cancel culture* ini sering kali berkesinambungan dan dihubungkan dengan pengaruh agama yang kuat. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan ajaran agama Islam memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan politik. Ketika tokoh masyarakat atau selebriti terlibat dalam kontroversi yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama atau nilai moral konservatif, reaksi masyarakat bisa sangat keras. Misalnya, selebriti atau politisi yang melakukan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama atau politik seperti pelecehan seksual atau ujaran kebencian, sering kali menghadapi tekanan yang sangat besar untuk meminta maaf atau bahkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan menuntut perubahan, serta menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk memperkuat moralitas sosialnya. Namun, ada juga kritik terhadap *Cancel culture* di Indonesia, di mana sebagian orang merasa bahwa fenomena ini dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kebencian dan intoleransi, serta mengancam kebebasan berekspresi.

Sebaliknya, di Korea Selatan, *Cancel culture* ini menjadi sangat terpolarisasi dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tekanan terhadap tokoh masyarakat untuk mematuhi standar moral yang sangat tinggi. Budaya populer Korea Selatan, yang sebagian besar didorong oleh industri hiburan, menuntut standar perilaku yang sangat ketat bagi selebriti dan tokoh masyarakat. Di negeri ini, sangat mudah seseorang “dikeluarkan” dari kehidupan publik jika terlibat dalam skandal yang dianggap merusak nama baik. Skandal yang melibatkan perilaku seperti narkoba, kekerasan atau bahkan komentar yang dianggap ofensif di media sosial dapat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, disertai kecaman dari pengguna internet dan, pada akhirnya, boikot dari penggemar.

Fenomena *Cancel culture* di Korea Selatan sangat terlihat pada beberapa kasus yang melibatkan idola K-pop, aktor, atau bahkan tokoh politik. Media sosial berperan penting dalam mempercepat proses kecaman sosial ini, di mana komentar atau postingan yang dianggap tidak sensitif atau berbahaya dapat dengan cepat menyebar dan memicu protes massal. Misalnya, kasus mantan Presiden Park Geun-hye, yang "dipecat" karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan bagaimana *Cancel culture* dapat memicu perubahan politik yang signifikan. Media sosial menjadi alat untuk memobilisasi massa dan menuntut akuntabilitas, yang akhirnya mengakibatkan penurunan pangkat dan penangkapan Park Geun-hye. *Cancel culture* di Korea Selatan juga terkadang menunjukkan sisi yang sangat keras, di mana seseorang dapat dihukum tanpa adanya proses hukum

yang jelas, dan banyak yang merasa bahwa hukuman sosial seringkali lebih berat dibandingkan dengan hukuman hukum yang diterima (Putri Febrianti et al., 2023).

Menariknya, di Korea Selatan, *Cancel culture* erat kaitannya dengan fenomena “*netizen power*” atau kekuatan pengguna internet. Dalam banyak kasus, pengguna internet memiliki kekuatan untuk memengaruhi citra seseorang atau bahkan menghancurkan kariernya hanya dengan membagikan pendapatnya secara online. Karena Korea Selatan adalah negara dengan tingkat konektivitas internet yang sangat tinggi, komentar di media sosial dapat dengan cepat menjadi viral, sehingga meningkatkan tekanan pada individu untuk menanggapi kritik atau meminta maaf secara terbuka. Selain itu, budaya “*fanatic fandom*” di Korea Selatan juga kerap memengaruhi proses *Cancel culture*, di mana penggemar berperan besar dalam menuntut akuntabilitas dari idolanya, baik dari segi perilaku pribadi maupun profesional (Anjarini, 2020).

Namun, di balik populernya *Cancel culture* di Korea Selatan, muncul juga kritik mengenai bagaimana fenomena ini dapat berujung pada “perburuan” individu tanpa proses hukum. Beberapa kritikus berpendapat bahwa *Cancel culture*, meskipun dimaksudkan untuk menegakkan keadilan atau moralitas, seringkali dapat menjadi alat untuk membungkam kritik atau menghukum seseorang hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan di masa lalu. Dalam hal ini, beberapa orang mulai menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kedua dan mendiskusikan cara-cara yang lebih

konstruktif dalam menanggapi kesalahan.

Di Indonesia dan Korea Selatan, meskipun ada kesamaan dalam *Cancel culture* berkembang melalui platform media sosial dan dikaitkan dengan moralitas sosial, kedua negara ini memiliki konteks budaya yang sangat berbeda. Di Indonesia, kuatnya pengaruh agama dan nilai-nilai tradisional kerap memperparah kontroversi terkait standar moral, sedangkan di Korea Selatan budaya kerja keras, disiplin, dan ekspektasi sosial terhadap politisi, idola dan selebriti sangat tinggi, sehingga meningkatkan tekanan pada individu dan harus selalu mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun *Cancel culture* sering kali dipandang sebagai cara untuk mendukung keadilan sosial, fenomena ini juga membuka perdebatan tentang sejauh mana masyarakat dapat memberikan ruang untuk perubahan dan perbaikan, dan bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara hukuman sosial dan hak individu untuk berkembang atau belajar dari kesalahannya (Demsar et al., 2023).

Secara keseluruhan, peran budaya dalam politik terkait *Cancel culture* di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya dapat berinteraksi dengan perkembangan teknologi dan media sosial sehingga menciptakan dinamika politik baru yang fokus pada moralitas, tanggung jawab sosial, dan kontrol perilaku publik. Meski berdampak positif dalam menuntut akuntabilitas, fenomena ini juga harus dihadapi dengan hati-hati agar tidak mengarah pada praktik sosial yang berpotensi menggerogoti kebebasan individu dan mengancam keberagaman

pandangan yang ada di masyarakat.

2.4 Respon Masyarakat Terhadap Pelanggar Norma

Banyak sekali respon masyarakat terhadap skandal yang melibatkan tokoh publik di Indonesia dan Korea Selatan dengan menunjukkan dinamika yang menarik dan berbeda, meskipun keduanya dipengaruhi konteks budaya dan sosial yang unik. Skandal yang melibatkan individu atau kelompok sering kali memicu reaksi publik yang sangat kuat baik dalam bentuk dukungan maupun kritik, tergantung pada sifat skandal tersebut dan bagaimana media serta masyarakat meresponnya. Skandal politik dan sosial sering kali mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik. Misalnya, dalam kasus skandal korupsi yang terjadi dalam proyek Base Transceiver Station 4G yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), masyarakat menunjukkan reaksi negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa bahwa politisi yang terlibat telah mengkhianati kepercayaan publik dan menunjukkan kurangnya akuntabilitas serta transparansi. Hal ini memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap politisi secara umum, dan juga menciptakan persepsi bahwa korupsi adalah masalah sistemik dalam politik Indonesia. Respon dan reaksi ini mencerminkan harapan masyarakat akan adanya perubahan reformasi dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika oleh tokoh publik.

Fenomena serupa juga terjadi di Korea Selatan, di mana gerakan

sosial yang kuat untuk menanggapi skandal sebagai respons yang melibatkan politisi, selebriti atau tokoh publik. Misalnya, kasus pelecehan seksual atau perilaku tidak etis lainnya kerap memicu protes di media sosial. Banyak masyarakat di Korea Selatan yang menggunakan platform media sosial untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dan dikenal sangat terbuka dalam mengungkapkannya. Hal ini ditunjukkan dengan gerakan #MeToo di Korea Selatan yang menarik perhatian masyarakat luas dan menyerukan perubahan dalam cara masyarakat Korea Selatan untuk menyerukan isu gender dan kekuasaan.

Di kedua negara ini, media sosial sangat berperan penting karena media sosial dijadikan sebagai arena utama untuk diskusi dan mobilisasi publik. Di Indonesia, *Cancel culture* muncul sebagai respons terhadap tindakan atau pernyataan tokoh masyarakat yang dianggap melanggar norma sosial. Publik bereaksi dengan mengurangi dukungan terhadap tokoh publik tersebut, termasuk berhenti mengikuti akun media sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin meminta pertanggungjawaban individu tersebut, namun juga ingin memberikan sinyal bahwa tindakan tidak etis tidak dapat diterima. Walaupun di Indonesia masyarakat sudah sangat paham dengan aksi *Cancel culture* ini, namun masih ada permintaan maaf dari masyarakatnya dan tokoh yang terkena skandal tersebut masih bisa eksis hingga saat ini. Sedangkan di Korea Selatan, meskipun terdapat kesamaan dalam penggunaan media sosial untuk mengungkapkan ketidakpuasan, reaksi masyarakat seringkali lebih

terorganisir dan terkadang lebih agresif. Misalnya, ketika seorang politisi, selebriti atau tokoh publik terlibat dalam sebuah skandal, seringkali ada gerakan kolektif untuk “membatalkan” kariernya secara permanen. Hal ini menimbulkan efek jera bagi individu atau kelompok lain yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindakan serupa. Namun, ada juga kritik terhadap fenomena ini karena dapat menyebabkan penilaian yang tergesa-gesa tanpa memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki atau menjelaskan situasinya.

Respon masyarakat setelah politisi, selebriti ataupun tokoh publik menerima skandal di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan perlunya akuntabilitas dan harapan akan perubahan sosial yang lebih baik. Masyarakat di kedua negara tersebut berupaya menggunakan suara mereka melalui media sosial sebagai alat untuk menuntut keadilan dan mendorong reformasi standar etika yang berlaku bagi tokoh publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal bagaimana memastikan bahwa proses ini tidak hanya menghasilkan reaksi emosional, namun juga mendorong perubahan struktural yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali di masa depan.

Perbedaan respon ini juga didukung oleh dinamika media sosial di kedua negara. Di Indonesia, media sosial menjadi arena diskusi yang hangat, namun respon terhadap skandal lebih bervariasi dan bisa berubah sesuai dengan narasi yang dibangun atau penggiringan opini oleh tokoh tersebut atau oleh media. Pengaruh politisi, selebritas, tokoh publik dan

loyalitas penggemar maupun pendukungnya sangat kuat, sehingga banyak dari mereka yang akan tetap mendukung tokoh publik tersebut walaupun telah melakukan kesalahan, apalagi jika mereka berhasil menyentuh emosi publik dengan permintaan maaf yang tulus. Namun, di Korea Selatan sosial media lebih sering digunakan untuk mengorganisir respon negatif, termasuk petisi dan kampanye untuk memboikot atau mengeluarkan tokoh tersebut dari industri. *Cancel culture* di Korea Selatan lebih ketat, dan sekali publik melabeli seseorang sebagai tokoh yang bermasalah, sulit bagi mereka untuk bangkit kembali karena beban stigma sosial yang sangat berat.

Masyarakat Korea Selatan juga sangat menjunjung tinggi kehormatan dan rasa malu, karena mereka menganggap bahwa skandal yang melibatkan tokoh publik merupakan cerminan dari kegagalan moral yang harus ditanggung penuh oleh tokoh publik tersebut. Mereka mengharapkan tokoh yang terlibat skandal akan segera mengundurkan diri dari sorotan publik, karena mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap para figur publik untuk menjalankan kehidupan yang bebas dari kontroversi, mereka juga menganggap hal tersebut sebagai representasi nilai-nilai moral bangsa. Inilah sebabnya mengapa tokoh yang terlibat dalam skandal besar, seperti korupsi, pelecehan ataupun kekerasan sulit diterima kembali oleh masyarakat meskipun mereka telah meminta maaf atau menjalani hukuman. Bila kasus atau skandal yang menimpa tokoh tersebut sangat berat, permintaan maaf di depan umum atau pengunduran diri belum tentu cukup untuk memulihkan reputasi tokoh tersebut. Karir

mereka bisa hancur dalam waktu singkat, dan mereka sering kali dikeluarkan dari proyek-proyek besar serta mengalami kesulitan untuk bekerja di industri yang sama lagi.

Selain itu, sistem hukum dan regulasi di kedua negara ini juga sangat berperan penting dalam memengaruhi reaksi masyarakat terhadap skandal. Di Indonesia sendiri banyak kasus skandal yang melibatkan figur publik itu menjadi belarut-larut di ranah hukum, dan proses yang panjang ini memberi waktu bagi masyarakat untuk melihat perubahan dan pembelaan dari pihak yang terlibat. Ketidakpastian hukum ini justru memicu simpati publik terhadap tokoh yang terlibat skandal, terutama jika tokoh tersebut mencoba memperbaiki diri atau tetap aktif berkontribusi secara positif di masyarakat. Di Korea Selatan, sistem hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar norma dan moral atau kriminal dari tokoh publik membuat masyarakat lebih yakin untuk memberikan dukungan terhadap “*Cancel culture*” sebagai cara untuk mempertahankan nilai moral. Pemerintahan, agensi dan brand di Korea Selatan memiliki kebijakan keras untuk memustuskan kontrak atau menangguhkan aktivitas figur yang terlibat skandal, sehingga masyarakat merasa lebih bebas untuk memberikan kritik tajam bagi para pelaku pelanggar norma.

Pengaruh besar juga datang dari media sosial karena media sosial sendiri memperkuat reaksi publik di kedua negara ini, di Indonesia komentar di media sosial sering kali mencerminkan pandangan yang beragam, dengan adanya kelompok yang membela maupun mengecam.

Namun, pola ini bisa berubah jika skandal tersebut melibatkan isu yang sangat sensitif, seperti SARA atau korupsi, di mana masyarakat akan bersatu untuk memboikot atau memberikan hukuman pada tokoh tersebut, sedangkan di Korea Selatan media sosial juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengorganisir kritik dan tuntutan terhadap tokoh publik. Petisi online, hashtag (tren tagar), serta komentar di berbagai platform sering kali terkoordinasi dengan sangat cepat dan menjadi viral. Ini memberikan tekanan yang besar kepada tokoh publik yang terlibat skandal, yang bahkan bisa berdampak pada karir dan kehidupan pribadinya dalam jangka panjang.

Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil, terutama terkait dengan pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua, berpengaruh pada cara masyarakatnya memandang kesalahan tokoh publik tersebut. Masyarakat Indonesia kerap menerima sosok yang sudah mengakui kesalahannya. Dengan suksesnya perubahan, seseorang yang telah menjalani hukuman atau rehabilitasi bahkan bisa kembali dengan citra yang lebih baik. Selain itu, masyarakat Indonesia sering kali menekankan aspek-aspek positif kepada seseorang tersebut, terutama jika seseorang tersebut telah berkontribusi dalam hal sosial, agama, atau budaya yang dianggap signifikan. Hal ini membuat sikap “melupakan tapi tidak sepenuhnya memaafkan” menjadi sangat umum dan lumrah terjadi di Indonesia, dimana masyarakat bisa memberikan toleransi untuk menahan memberikan kritikan namun tetap bersikap waspada. Sebaliknya, di Korea Selatan pelanggaran moral yang dilakukan oleh seorang tokoh

publik dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan nama baik pribadinya, keluarganya, serta lembaga-lembaga yang terkait dengannya. Konsep kehormatan begitu kuat sehingga tindakan seseorang dalam publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok yang lebih besar. Misalnya, skandal yang melibatkan seorang selebriti atau pejabat publik dapat berdampak pada keluarga, agensi atau perusahaannya, dan bahkan orang-orang yang mendukungnya. Oleh karena itu, masyarakat Korea Selatan jarang sekali memaafkan, karena hal ini dipandang sebagai kelemahan atau komitmen terhadap standar sosial yang tinggi.

Media Korea Selatan sangat memengaruhi opini publik dan seringkali menjadi pihak yang memicu “penghakiman” sosial terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam skandal. Media juga berfungsi sebagai sarana validasi moral bagi masyarakat Korea Selatan, di mana pemberitaan negatif dapat menjadi semacam “hukuman publik” yang bisa lebih berat daripada hukuman formal karena hukuman dari *Cancel culture* ini bisa lebih memberikan efek jera.

Sebaliknya, media di Indonesia menggunakan pendekatan yang berbeda. Media di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, sehingga seringkali tidak secara langsung mengadili individu yang terlibat dalam skandal. Faktanya, karena alasan tertentu media terkadang memilih untuk membela atau melindungi individu tertentu. Artinya, masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada media

dalam menentukan cara mereka menangani skandal. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube seringkali menentukan sikap dan reaksi masyarakat. *Cancel culture* ini memungkinkan masyarakat mengutarakan pendapatnya secara langsung dengan berbagai tanggapan, melalui platform media sosial yang ada.

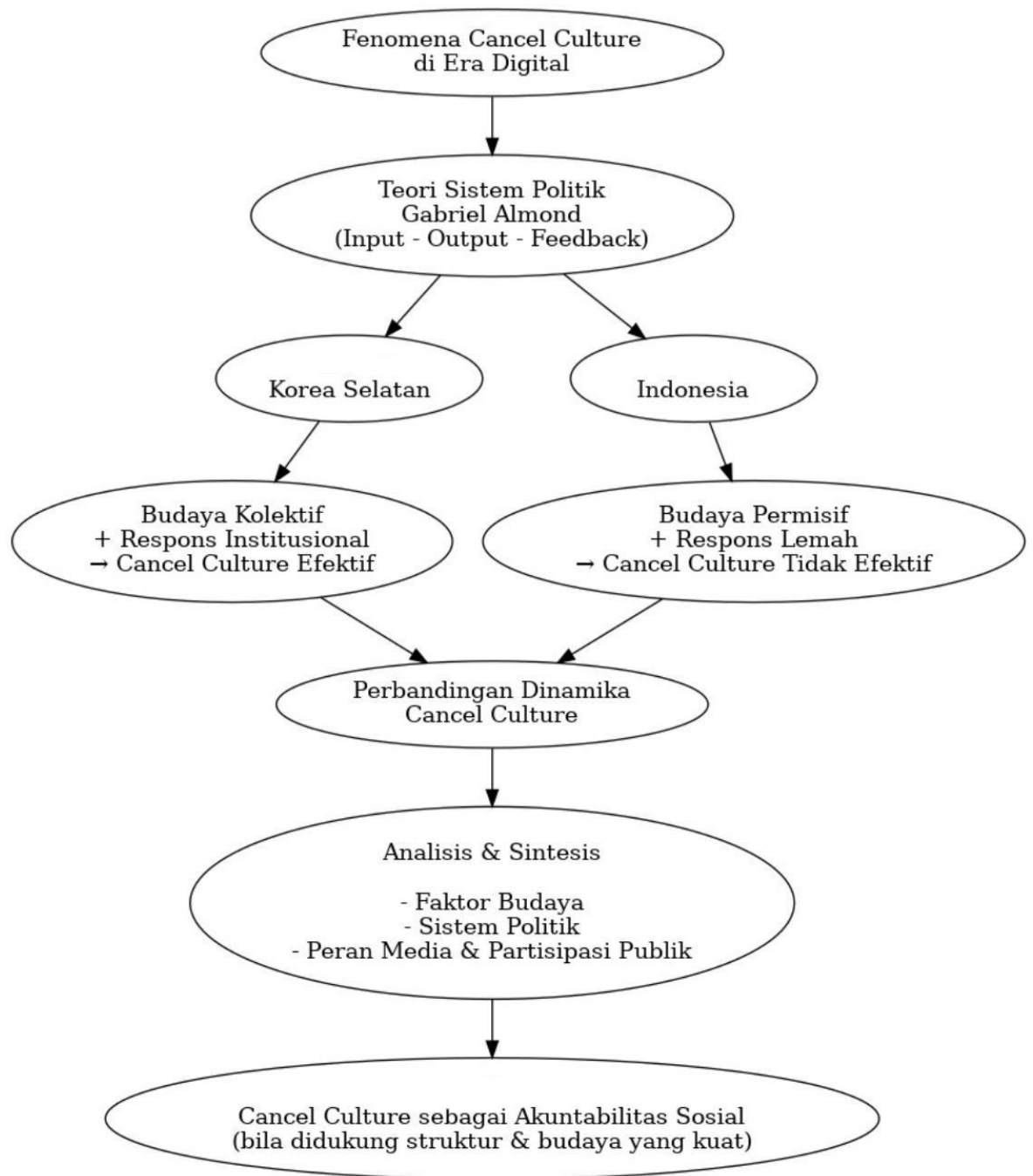
2.5 Penelitian Terdahulu

- Penelitian Alfin Nur Laili, Pudjo Suharso, Sukidin, dengan judul *“Navigating Cancel Culture in Indonesia: Understanding Cyberbullying and Social Control in Viral Cases (September-November 2023)”*, yang diterbitkan oleh Jurnal Antropologi: Isu – Isu Sosial Budaya (JANTRO) Universitas Andalas, tanggal 14 Juni 2024. Penelitian ini menitikberatkan pada sosial kontrol masyarakat Indonesia dalam media sosial dan mengarah pada *cyberbullying* yang malah semakin memperkeruh suasana dan kontrol masyarakat.
- Penelitian Nikitha Gopal, Abigail Velasquez, Peter Wu, dengan judul *“The Effect of Twitter Cancel Culture on the Music Industry”*, yang diterbitkan oleh *UCSD's Halicioğlu Data Science Institute*, tanggal 16 Maret 2022. Penelitian ini menitikberatkan pada *Cancel culture* yang dialami oleh sejumlah musisi di Korea Selatan.
- Penelitian Nadhira Putri Febrianti, Zalina Ahmad, Sharifuzah Osman, Ainun Nimatu Rohmah, dengan judul *“The K-Pop Fans Perception Over a Cancel Culture Phenomenon”*, yang diterbitkan

oleh Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, tanggal 15 Juni 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada persepsi fans K-pop atau Korean Pop mengenai bagaimana fenomena Cancel culture ini bisa terjadi di kalangan masyarakat terhadap tokoh publik di Korea Selatan dan reaksi mereka sebagai penikmat industri negara Korea Selatan tapi dari pandangan penggemar yang bersal dari Indonesia.

- Penelitian Kaylin Lane, dengan judul *“Sticks and Stones May Break My Bones, but Will Comments Ever Hurt Me? : a Burkean Analysis of Cancel Culture in Social Media Spaces”*, yang diterbitkan oleh *Illinois State University*, tanggal 20 Maret 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada sisi “penerima” *Cancel culture* yang banyak diberikan kata-kata jahat di internet dan membuat seseorang tersebut tidak bisa kembali ke ranah publik.
- Penelitian Philipp Bagus, Frank Daumann, Florian Follert, dengan judul *“Microaggressions, Cancel Culture, Safe Spaces, and Academic Freedom: A Private Property Rights Argumentation”*, yang diterbitkan oleh *Business Ethics, the Environment & Responsibility published by John Wiley & Sons Ltd*, tanggal 23 Oktober 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada kebebasan memberikan pendapat dalam sebuah konten dan dalam ruang publik di ranah akademik.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran